

Kolaborasi Pemerintah Desa dan Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Sekolah Inklusif di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara

Abdul Nashar¹, Chairan Zibar L.Parisu², Joko Tri Brata³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara¹

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sulawesi Tenggara²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara³

e-mail: abdulnashar@gmail.com chairanzibar1.parisu@gmail.com
joko_tribrata@yahoo.co.id

Abstrak

Kondisi pendidikan inklusif di wilayah pedesaan, khususnya di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep inklusivitas hingga terbatasnya dukungan kelembagaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan sekolah dasar dalam mewujudkan sekolah inklusif yang ramah dan terbuka bagi semua anak. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif bersama perangkat desa, guru, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan inklusif, serta munculnya komitmen bersama untuk mendukung akses dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kegiatan ini memberikan manfaat nyata berupa terbentuknya forum komunikasi antara sekolah dan pemerintah desa sebagai wadah koordinasi berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi model kolaboratif yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan kondisi serupa.

Kata Kunci: *Sekolah Inklusif, Kolaborasi, Pemerintah Desa, Pendidikan Dasar, Partisipasi Masyarakat.*

Abstract

The condition of inclusive education in rural areas, especially in Langgikima District, North Konawe Regency, still faces various challenges, ranging from the lack of community understanding of the concept of inclusivity to limited institutional support for children with special needs. This service aims to strengthen collaboration between village governments and elementary schools in realizing inclusive schools that are friendly and open to all children. The method of implementing the activity includes socialization, training, and mentoring carried out in a participatory manner with village officials, teachers, and the community. The results of the activity showed an increase in understanding of stakeholders regarding the importance of inclusive education, as well as the emergence of a joint commitment to support access and educational facilities for children with special needs. In addition, this activity provides real benefits in the form of the formation of a communication forum between schools and village governments as a forum for ongoing coordination. This program is expected to become a collaborative model that can be replicated in other areas with similar conditions.

Kata Kunci: *Inclusive School, Collaboration, Village Government, Basic Education, Community Participation.*

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menjamin hak setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dalam lingkungan sekolah yang ramah dan berkeadilan. Namun, implementasi pendidikan inklusif di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, banyak sekolah dasar yang belum memiliki pemahaman, fasilitas, maupun kebijakan pendukung yang memadai. Permasalahan ini memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa dan sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara keduanya dalam merintis serta memperkuat praktik pendidikan inklusif. Fokus utama kegiatan meliputi sosialisasi, pelatihan, pembentukan forum koordinasi desa-sekolah, serta pendampingan penyusunan rencana aksi inklusi. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal, program ini diharapkan menjadi pemicu perubahan positif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan paradigma pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang ramah, adil, dan menghargai perbedaan. Sistem ini tidak hanya mencakup penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai secara akademik, sosial, dan emosional (Ainscow, Slee, & Best, 2022). Dalam konteks pendidikan dasar, keberadaan sekolah inklusif menjadi sangat penting sebagai fondasi awal yang membentuk karakter toleransi dan keberagaman sejak dini.

Namun, implementasi pendidikan inklusif di daerah terpencil dan pedesaan, seperti Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, menghadapi tantangan tersendiri. Minimnya sumber daya pendidikan, terbatasnya tenaga pendidik yang terlatih dalam pendekatan inklusif, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya inklusi menjadi hambatan besar. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al. (2023) menunjukkan bahwa di banyak sekolah dasar pedesaan, guru belum memahami sepenuhnya strategi pembelajaran yang sesuai bagi siswa berkebutuhan khusus, dan keterlibatan komunitas masih bersifat pasif.

Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung transformasi menuju sekolah inklusif. Dengan adanya kebijakan Dana Desa, potensi kolaborasi antara pemerintah desa dan sekolah menjadi semakin terbuka. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2022), salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk mendukung layanan dasar,

termasuk pendidikan. Hal ini sejalan dengan temuan Utami & Widodo (2021) yang menyatakan bahwa intervensi desa dalam bentuk regulasi lokal, penyediaan sarana pendidikan ramah disabilitas, dan sosialisasi kepada masyarakat mampu meningkatkan kesiapan sekolah menerapkan prinsip inklusi.

Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Di Kecamatan Langgikima, misalnya, masih banyak desa yang belum menjadikan isu pendidikan inklusif sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa. Padahal, dukungan pemerintah desa sangat diperlukan dalam mengatasi hambatan struktural maupun kultural yang dihadapi sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif. Kolaborasi antara sekolah dan pemerintah desa bukan hanya soal teknis pengelolaan pendidikan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil.

Melalui pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara partisipatoris, artikel ini bertujuan mengeksplorasi bentuk-bentuk kolaborasi yang dapat dibangun antara pemerintah desa dan sekolah dasar di Langgikima dalam mewujudkan sekolah inklusif. Fokus utama adalah pada bagaimana pemangku kepentingan lokal memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan program inklusif berbasis kebutuhan desa dan sekolah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model kolaboratif berbasis lokal yang aplikatif dan berkelanjutan dalam mendukung sistem pendidikan inklusif di wilayah pedesaan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Laronanga dan Desa Alenggo, Kecamatan Langgikima, pada bulan Juni 2025. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Tahapan kegiatan meliputi: (1) Observasi dan identifikasi masalah melalui wawancara dengan kepala desa, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat; (2) Sosialisasi dan dialog publik tentang pendidikan inklusif; (3) Pendampingan penyusunan rencana aksi bersama; dan (5) Monitoring dan evaluasi awal melalui refleksi kelompok dan kuesioner. Seluruh metode dirancang untuk memperkuat kapasitas lokal dan membangun sinergi antara desa dan sekolah dalam menciptakan pendidikan yang inklusif.

Materi pengabdian disampaikan oleh tim multidisipliner yang terdiri atas: H. Joka Tri Bara dan Abdul Nashar dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Chibar L. Parizu dan Muh. Itznain dari Program Studi PGSD, Aris Zusisman dari Program Studi PG-PAUD, serta Bapak Muhardin selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara. Kehadiran unsur legislatif memberikan dimensi kebijakan yang memperkaya diskusi terkait dukungan regulatif terhadap pendidikan inklusif.

Kegiatan ini diikuti oleh 37 peserta yang terdiri atas aparat pemerintah Kecamatan Langgikima, para kepala desa dan aparat pemerintah desa, kepala sekolah dan guru-guru SD, serta kepala dan guru PG-PAUD yang ada di wilayah Kecamatan Langgikima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian di Kecamatan Langgikima, menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam hal peningkatan kesadaran dan komitmen bersama terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebelum intervensi dilakukan, hasil observasi awal dan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan pihak sekolah menunjukkan bahwa konsep pendidikan inklusif masih dipahami secara terbatas, bahkan kerap disalahartikan sebagai bentuk pendidikan khusus yang terpisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagian besar guru belum memiliki pelatihan formal dalam hal strategi pembelajaran inklusif, sementara pemerintah desa belum memiliki program yang secara eksplisit mendukung penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan.

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, terjadi perubahan yang cukup berarti dalam cara pandang dan sikap para pemangku kepentingan. Sosialisasi yang bersifat dialogis memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk memahami pentingnya menjamin hak pendidikan yang setara bagi semua anak tanpa diskriminasi. Materi yang disampaikan secara kontekstual, dengan mengaitkan isu inklusi pada realitas sosial desa, membuat peserta lebih mudah menerima dan memahami urgensi transformasi kebijakan lokal. Dalam forum-forum diskusi, mulai muncul kesadaran bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tetapi juga memerlukan dukungan kolektif dari seluruh unsur desa, termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga adat.

Hasil pelatihan yang dilakukan kepada guru dan aparat desa juga menunjukkan dampak positif. Para guru mulai menyusun rencana pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan individual siswa, termasuk mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, pendengaran, atau perkembangan kognitif. Beberapa guru bahkan secara inisiatif membentuk kelompok diskusi internal untuk saling berbagi strategi dan sumber belajar alternatif. Di sisi lain, perangkat desa menyatakan kesiapan mereka untuk mengalokasikan anggaran desa dalam mendukung program sekolah inklusif, seperti penyediaan aksesibilitas fisik (ramp, toilet khusus), pengadaan alat bantu belajar, hingga pembentukan forum peduli anak inklusif di tingkat desa.

Respon positif terhadap pelatihan juga tercermin dari munculnya berbagai inisiatif lokal yang memperkuat komitmen terhadap inklusi pendidikan. Misalnya, di salah satu desa sasaran, pemerintah desa bersama sekolah menyusun konsep program “Sahabat Inklusi Desa”, yakni skema pendampingan berbasis masyarakat yang melibatkan kader desa dan orang tua dalam memantau serta mendukung perkembangan anak-anak berkebutuhan

khusus. Skema ini tidak hanya menjadi strategi teknis, tetapi juga menjadi media edukatif bagi masyarakat untuk memahami keberagaman sebagai bagian dari kekuatan sosial desa. Menurut Ainscow & Miles (2008), pendidikan inklusif menuntut adanya keterlibatan seluruh komunitas dalam mengubah struktur, kebijakan, dan praktik agar lebih responsif terhadap keragaman peserta didik. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Sunardi (2011), yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia hanya akan berhasil jika didukung oleh kolaborasi antarpihak, mulai dari sekolah, pemerintah lokal, hingga masyarakat luas. Kegiatan pelatihan ini juga membuka ruang refleksi bagi para guru tentang pentingnya pendekatan humanistik dalam pembelajaran, serta mendorong perubahan paradigma dari sekadar pengajaran ke arah pemberdayaan peserta didik secara menyeluruh dan inklusif.

Sementara itu, keberadaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara dalam kegiatan pengabdian turut memperkaya diskusi kebijakan dengan memberikan perspektif dari sisi legislatif. Kehadiran beliau tidak hanya sebagai undangan seremonial, tetapi juga sebagai bagian dari proses dialog kebijakan antara akademisi, praktisi pendidikan, dan pemangku kebijakan daerah. Dalam sesi diskusi, disampaikan pentingnya sinkronisasi antara regulasi desa dan kebijakan kabupaten agar pendidikan inklusif mendapat perlindungan dan penguatan hukum yang lebih luas. Sebagaimana ditegaskan oleh Booth dan Ainscow (2011), pengembangan kebijakan pendidikan inklusif harus mencakup kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan menyeluruh. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Nugroho (2018), bahwa kebijakan publik inklusif di Indonesia memerlukan dukungan politik dan peraturan daerah yang jelas, agar implementasi di tingkat akar rumput dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini juga telah mendorong rencana tindak lanjut berupa fasilitasi pertemuan lintas sektor untuk merumuskan draf regulasi bersama yang mendukung implementasi pendidikan inklusif secara sistematis di wilayah Konawe Utara.

Salah satu capaian paling strategis dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana aksi kolaboratif antara sekolah dan pemerintah desa yang berisi langkah-langkah konkret dan terukur dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Rencana aksi ini tidak hanya mencakup aspek fisik dan teknis, tetapi juga aspek sosial-kultural, seperti peningkatan pemahaman orang tua terhadap pentingnya menerima perbedaan dan mendukung perkembangan anak secara utuh. Komitmen untuk menjadikan sekolah dasar sebagai ruang inklusif juga diwujudkan dalam penyusunan peraturan desa (Perdes) yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Temuan ini sejalan dengan pandangan UNICEF (2020) bahwa pendidikan inklusif membutuhkan pendekatan lintas-sektor dan keterlibatan aktif pemerintah lokal dalam menciptakan ekosistem pendukung yang ramah terhadap keberagaman. Hasil pengabdian ini juga memperkuat teori kolaborasi

lintas sektor dalam pelayanan publik, yang menekankan pentingnya sinergi antaraktor dalam menyelesaikan persoalan kompleks yang tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah desa dan sekolah dasar terbukti menjadi strategi yang efektif untuk memulai transformasi pendidikan inklusif dari tingkat akar rumput. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, keberadaan forum komunikasi dan rencana aksi bersama menjadi fondasi awal yang kuat untuk membangun praktik inklusi secara berkelanjutan di wilayah pedesaan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada kolaborasi antara pemerintah desa dan sekolah dasar dalam mewujudkan sekolah inklusif di Kecamatan Langgikima telah menghasilkan capaian yang positif dan relevan. Secara umum, intervensi ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kepedulian berbagai pemangku kepentingan terhadap pentingnya pendidikan inklusif yang menjamin hak semua anak untuk belajar tanpa diskriminasi. Melalui pendekatan partisipatif dan pelatihan berbasis kebutuhan lokal, para guru dan perangkat desa menunjukkan transformasi sikap dan komitmen dalam mendukung praktik inklusi di sekolah dasar.

Hasil konkret dari kegiatan ini antara lain: terselenggaranya forum dialog dan pelatihan yang produktif, terbentuknya kelompok kerja bersama antara pihak sekolah dan pemerintah desa, serta disusunnya rencana aksi kolaboratif yang mencakup aspek kebijakan, penyediaan fasilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Lebih jauh, kolaborasi ini menjadi model awal pembangunan pendidikan inklusif berbasis komunitas yang potensial untuk direplikasi di wilayah-wilayah dengan karakteristik sosial serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., Slee, R., & Best, M. (2022). The place of inclusive education within the UN Sustainable Development Goals. *International Journal of Inclusive Education*, 26(5), 453–468. <https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1879963>
- Damayanti, R., Sulastri, F., & Taufik, A. (2023). Tantangan Guru dalam Implementasi Sekolah Inklusif di Daerah 3T di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 9(1), 77–89. <https://doi.org/10.33503/jpdn.v9i1.2345>
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2022). *Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Utami, P. A., & Widodo, H. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Pendidikan Inklusif di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 121–134. <https://doi.org/10.21009/jakp.122.06>
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all*. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>